

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota

ANGGARAN COVID-19 GORONTALO

Audit BPK, Ada Masalah

HASIL AUDIT DANA COVID-19

- Rasionalisasi belanja daerah untuk Covid-19 belum sesuai ketentuan
- Refocusing dan realokasi anggaran belanja penanganan Covid-19 belum sepenuhnya sesuai ketentuan
- Pengadaan sembako pada kegiatan pasar murah belum sesuai ketentuan
- Akuis untuk penanganan Covid-19 di RSUD Tolo Kabita belum dimaksimalkan
- Tambahan belanja aset tenaga untuk Covid-19 belum sepenuhnya sesuai ketentuan
- Laboratorium penemuan kasus Covid-19 belum memadai
- Pengambilan dan pengiriman spesimen belum memadai
- Penemuan kasus Covid-19 secara aktif belum memadai
- Manajemen sistem pengendalian Covid-19 belum memadai



GORONTALO - GP- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam penggunaan dana penanganan Covid-19 oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Gorontalo. Permasalahan ini ditemukan setelah BPK melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah di semester II

tahun anggaran 2020. Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo, Dwi Sabardiana, saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK semester II di Kantor BPK Perwakilan Gorontalo, kemarin (18/12), menguraikan, berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan penanganan pandemi Covid - 19, masih ditemukan permasalahan.

II Bersembung ke Hal.4



PENYERAHAN LHP semester II tahun anggaran 2020 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Jumat (18/12).

dari halaman 1

"Antara lain adalah rasionalisasi belanja daerah untuk penanganan Covid - 19 belum sepenuhnya sesuai ketentuan serta sebagian hasil refocussing dan realokasi anggaran dialokasikan untuk belanja yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid - 19," kata Dwi Sabardiana.

Dia menegaskan rasionalisasi belanja daerah untuk penanganan Covid - 19 tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan lain yang juga ditemukan adalah upaya pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo untuk menyediakan jejaring laboratorium dalam rangka penemuan kasus Covid-19 belum memadai. Penatalaksanaan pengambilan dan pengiriman spesimen oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo

dalam rangka penemuan kasus Covid - 19 juga belum memadai. Bahkan, penemuan kasus Covid - 19 secara aktif dalam rangka mengendalikan pandemi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo juga belum memadai. Manajemen klinis dalam rangka mengendalikan pandemi Covid - 19 oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo belum memadai, dan Penertiban regulasi terkait penerapan disiplin protokol kesehatan oleh pemerintah provinsi Gorontalo belum didukung oleh petunjuk pelaksanaan yang jelas. Serta, upaya pencegahan Covid-19 melalui promosi kesehatan oleh pemerintah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Selain anggaran Covid, BPK juga memberikan catatan terhadap belanja daerah yaitu barang dan jasa sampai dengan

30 Oktober 2020. Permasalahan yang ditemukan dan perlu mendapatkan perhatian adalah Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang tidak sesuai kondisi senyatanya pada 19 OPD sebesar RP 580.23 Juta. Kekurangan volume pada pelaksanaan kegiatan penyediaan rumah hunian layak (Mahyan) bagi masyarakat miskin pada 2020 sebesar Rp 179,72 juta.

Serta kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp 487,57 juta.

"Ini harus mendapatkan perhatian yang serius bagi pemerintah daerah dengan segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dalam waktu 60 hari, sesuai yang diatur dalam pasal 20 ayat 3 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang

pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara," ujar Dwi saat menutup sambutannya.

Menanggapi paparan ini, Walikota Gorontalo Marten Taha yang mewakili seluruh kepala daerah menyampaikan bahwa, masalah pandemi Covid - 19 ini adalah masalah yang

baru, bahkan baru pertama kali terjadi.

"Tidak ada juga yang memprediksi masalah Covid-19, sehingga kita semua masih bisa dikatakan baru dalam menghadapi hal ini. Bahkan khusus kita di Kota Gorontalo ada dua bencana yaitu bencana non alam Covid - 19, dan juga

bencana alam berupa banjir yang sampai melanda kita sampai delapan kali," kata Marten.

Akan tetapi dengan adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK ini tetap akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah unntuk perbaikan ke depan. **(wan)**

Diambil dari: Harian Gorontalo Post, Sabtu 19 Desember 2020